**ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) MUI NOMOR 13
TAHUN 2000 TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH****ANALYSIS OF FATWA SHARIA NATIONAL COUNCIL (DSN) MUI NUMBER 13 YEAR 2000
ABOUT ADVANCE IN MURABAHAH****¹Panji Adam, ²Maman Surahman, ³ Popon Srisusilawati**

^{1,2,3},*Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
email : ¹panjiadam06@gmail.com , ²abuazkaalmadani@gmail.com, ³po2nss@gmail.com

Abstract. *In the study of Jurisprudence, advances are called urbun. The scholars differ on the legal status of the urban, whether included in a vanity contract or included in a legitimate contract. The majority of scholars argue that buying and selling by using advances (urbun) is haram, whereas according to Imam Ahmad and his followers, buying and selling by using advance (urbun) is allowed. The research was conducted by using normative juridical approach, descriptive analysis, secondary data type, data retrieval technique with library research and data analysis technique with qualitative analysis. The result of the conclusion shows that: (1) a strong opinion about the sale and purchase of urbun is a permissible opinion, and the sale and purchase using the legal advances is allowed; (2) The legal basis used by each DSN-MUI uses general arguments in determining the fatwa, and the istinbat method used is the maslahat and urf method. According to Syamsul Anwar, the concept of urbun (advances) in the National Shari'ah Council Fatwa (DSN) of MUI is more suitable to be qualified as compensation based on agreement with the initial payment from the urbun on the grounds that: first, Cutting down payment by LKS in the event the customer cancels the contract murabaha is based on the amount of loss experienced, so if the urbun is greater than the loss of LKS, the side is returned to the customer and if smaller, LKS can request additional deficiencies; secondly, In its notion, the DSN does not mention the hadith of urbun prohibition; thirdly, the fatwa quotes the hadith about the terms (clause) of the covenant, the Muslims are loyal to their conditions, and the hadiths about compensation, Should not be self-defeating and should not harm others; (3) The DSN-MUI fatwa concerning the advances in murabahah is influenced by the thoughts of Imam Ahmad and his followers who allow the sale and purchase using the down payment.*

Keywords: *Advance, Murabaha, Fatwa DSN-MUI*

Abstrak, *Dalam kajian fikih, uang muka disebut dengan urbun. Ulama berbeda pendapat mengenai status hukum urbun tersebut, apakah termasuk ke dalam akad yang batil ataukah termasuk ke dalam akad yang sah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli dengan menggunakan uang muka (urbun) adalah haram, sedangkan menurut Imam Ahmad dan pengikutnya, jual beli dengan menggunakan uang muka (urbun) adalah boleh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, jenis data sekunder, teknik pengambilan data dengan studi pustaka (library research) dan teknik analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa: (1) pendapat yang kuat mengenai jual beli urbun adalah pendapat yang membolehkan, dan jual beli dengan menggunakan uang muka hukumnya adalah boleh; (2) Dasar hukum yang digunakan oleh DSN-MUI masing menggunakan dalil-dalil umum dalam menetapkan fatwa tersebut, serta metode istinbat yang digunakan adalah metode maslahat dan urf. Menurut Syamsul Anwar, konsep urbun (uang muka) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI ini lebih cocok dikualifikasikan sebagai ganti rugi berdasarkan kesepakatan dengan pembayaran awal dari pada urbun dengan alasan bahwa:pertama, Pemotongan uang muka oleh LKS dalam hal*

nasabah membatalkan akad murabahah didasarkan pada besarnya kerugian dialaminya, sehingga apabila urbung itu lebih besar dari kerugian LKS, sisinya dikembalikan kepada nasabah dan apabila lebih kecil, LKS dapat meminta tambahan kekurangannya; kedua, Dalam konsiderannya, DSN tidak menyinggung hadits larangan urbung; ketiga, Sebaliknya fatwa tersebut mengutip hadits tentang syarat (klausul) perjanjian, kaum muslimin setia kepada syarat-syarat mereka, dan hadits tentang ganti rugi, Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain; (3) Fatwa DSN-MUI tentang uang muka dalam murabahah dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ahmad dan para pengikutnya yang membolehkan jual beli dengan menggunakan uang muka.

Kata Kunci: *Uang Muka, Murabahah, Fatwa DSN-MUI*

1. Pendahuluan

Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Syari'ah. Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya (Kasmir, 1998: 2).

Lembaga keuangan konvensional ialah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional. Adapun lembaga keuangan Syari'ah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip Syari'ah.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di maksud dengan prinsip syari'ah adalah :

“Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah”.

Dari ketentuan di atas tampak bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, prinsip hukum Islam yang akan digunakan dalam kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan Syari'ah terlebih dahulu harus ditetapkan dalam fatwa, yang dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan Syari'ah, ulama semakin tertuntut untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan lembaga tersebut. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan (Jaih Mubarak, 2004: 11).

Lembaga keuangan Syari'ah khususnya lembaga pembiayaan melakukan cara penyaluran dana melakukan cara penyaluran dana kepada masyarakat adalah melalui prinsip jual beli yang didasarkan pada akad atau fasilitas, antara lain, *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Dengan adanya jual beli, maka terjadi peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang atau benda (*transfer of property*) dari penjual kepada pembelinya. Dalam melakukan transaksi jual beli ini, nasabah pembiayaan konsumen dapat difasilitasi melalui akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Syari'ah khususnya lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan Syari'ah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen lembaga, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional (Rachmadi Usman, 2009: 176).

Akad *murabahah* termasuk salah satu dari sekian macam jenis jual beli. Secara sederhana akad *murabahah* adalah jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2011: 138).

Dalam praktiknya di lembaga keuangan Syari'ah akad jual beli *murabahah* ini terdapat sebuah ketentuan dimana pihak lembaga boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini lazim disebut dengan *ba'i al-'urbun*. Nampaknya tidak semua kegiatan usaha lembaga pembiayaan menggunakan sistem jual beli *al-'urbun*, hanya kegiatan pembiayaan konsumtif sajalah yang menggunakan sistem jual beli *al-'urbun*.

Di kalangan para fukaha jual beli *al-'urbun* merupakan salah satu akad yang diperdebatkan apakah sah atau batil dengan kata lain bertentangan dengan hukum Islam. Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli *'urbun*. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli *'urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Akan tetapi menurut Hanafi, jual beli *'urbun* hukumnya *fasid*. Mayoritas ulama mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal, hal ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW, yaitu: “*Bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli secara panjar (ba'i al-'urban)*” (Ibn Majah, 2008, Juz. I: 690).

Hadits ini secara jelas melarang jual beli *'urbun*, dengan sabda Rasulullah SAW dengan menggunakan lafadz *nahyi* (larangan), maka dari itu jumhur fuqaha melarang jual beli *'urbun* berdasarkan hadits ini.

Menurut Ibnu Rusyd mayoritas fuqaha selain berargumentasi dengan hadits di atas, mayoritas fuqaha melarangnya dengan argumentasi lain bahwasannya jual beli tersebut termasuk ke dalam bab kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta orang lain tanpa adanya suatu imbalan (Ibn Rusyd, 2008, Juz. I: 131). Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan bahwa jual beli ini boleh saja dilakukan. Ini berdasarkan beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan Abu Syaibah dalam kitab *Mushannaf-Nya*, dari hadits Zaid bin Asalam, yaitu : “*Bahwasannya Rasulullah SAW menghalalkan sistem panjar dalam jual beli*” (Ibn Abi Syaibah, t.th, Juz. VII: 304).

Kedua hadits yang dijadikan argumentasi oleh para ahli fiqh ini saling berlawanan. Bahwasannya ada hadits yang melarang jual beli *'urbun* di sisi lain ada hadits yang membolehkannya. Nampaknya kedua hadits yang berlawanan ini perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai derajat haditsnya.

Keabsahan jual beli *murabahah* ini terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Lebih khusus lagi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dikenal juga suatu institusi serupa *'urbun* dan disebut dengan uang muka. pembayaran uang muka ini diberlakukan dalam akad

murabahah antara suatu lembaga keuangan Syari'ah dengan nasabahnya. Ketentuannya disebutkan pada angka 7 dari amar kedua Fatwa DSN No. 13/DN-MUI/2000.

Tampaknya konsep jual beli '*urbun*' yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.13/DN-MUI/2000 masih menggunakan dalil yang umum mengenai jual beli baik dalil berupa Al-Qur'an maupun Hadits Nabi dan tidak mencantumkan dalil secara khusus mengenai uang muka tersebut. Padahal dalam literatur fiqh banyak diperbincangkan mengenai status jual beli '*urbun*' (uang muka) disebabkan adanya dua hadits yang saling kontradiksi yang telah penulis sebutkan di atas.

Oleh karena itu penulis berusaha meneliti pendapat para fuqaha mengenai status jual beli '*urbun*' ini serta meneliti argumen-argumen lain yang menjadi landasan dalam menentukan status hukum jual beli '*urbun*' dan mengkategorikannya ke dalam jenis-jenis akad, apakah termasuk akad yang *sah*, *fasid* atau *batil*. Serta menganalisis faktor-faktor munculnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 13/DN-MUI/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah yang tampaknya masih menjadi perbincangan di kalangan ulama klasik mengenai status hukumnya dan menganalisis sejauh mana adanya relevansi antara pendapat para fuqaha klasik dengan fatwa DSN mengenai uang muka.

2. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan latar belakangnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana pendapat para fuqaha klasik mengenai hukum jual beli '*urbun*?; *kedua*, Bagaimana dasar hukum dan metode istinbath yang digunakan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah? *Ketiga*, Bagaimana pengaruh pendapat para fuqaha klasik terhadap fatwa DSN mengenai uang muka?

1. Pendapat Para Fuqaha Klasik Mengenai Hukum Jual Beli 'Urbun

Para ahli fikih berbeda pendapat menyangkut hukum jual beli '*urbun*'. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli '*urbun*' adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Akan tetapi, menurut Hanafi jual beli '*urbun*' hukumnya hanya *fasid*. Sedangkan menurut selain madzhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal. Imam Ahmad berpendapat bahwasannya jual beli ini boleh saja dilakukan, dan bukan termasuk jual beli yang batal. Yang berpendapat bahwasannya jual beli '*urbun*' adalah haram adalah mayoritas ahli ilmu, yaitu Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan para Sahabatnya. Menurut madzhab Maliki bahwasannya jual beli '*urbun*' termasuk kategori jual beli yang batil. Mereka berargumentasi dengan hadits yang melarang jual beli '*urbun*'. Imam al-Qurthubi berkata di dalam tafsirnya (Jami' al-Ahkam al-Qur'an): Yang termasuk ke dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil/tanpa adanya hak (dalam surat An-Nisa: 29) adalah jual beli '*urbun*' (dengan menggunakan uang muka), yaitu pembeli mengambil dari penjual barang dagangan atau menyewa binatang ternak dan pembeli atau penyewa memberikan satu dirham atau lebih, dan apabila pembeli atau penyewa tersebut melanjutkan transaksi jual beli atau sewa menyewa tersebut maka uang sebagian uang yang telah diberikan oleh pembeli atau penyewa adalah bagian dari harga beli atau sewa, dan apabila pembeli meninggalkan barang dagangan atau binatang ternak sewaan tersebut, maka apa yang diberikan oleh aku (pembeli/penyewa) adalah untukmu (penjual/pemilik binatang) (Imam al-Qurthubi, 2007, Juz. III: 136).

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa jual beli ini boleh saja dilakukan. Hal ini berdasarkan beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dalam kitab *Mushanaf*-nya, dari Zaid ibn Aslam bahwa, "dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW menyangkut uang muka yang di serahkan dalam jual

beli, lalu Rasulullah menghalalkannya”, dan hadits riwayat Nafi’ ibn Abd al-Harits, “Nafi’ membeli rumah penjara untuk Umar dari Shafwan ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Jika Umar menyetujui maka jual beli akan berlaku, akan tetapi jika Umar tidak menyetujui maka Shafwan berhak mengambil empat ratus dirham”. (Wahbah al-Zuhaili, 2010, Juz. IV: 119).

Imam Ahmad memvonis *dha’if* (lemah) hadits yang diriwayatkan dalam masalah jual beli dengan sistem uang muka. Sedangkan dewasa ini, jual beli dengan memakai sistem uang muka telah mejadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian memberi kompensasi bahaya bagi pihak lain karena risiko menunggu dan tidak berjalannya usaha. Selain itu ia juga menyandarkan pada qiyas dengan satu bentuk penjualan yang disepakati kehalalannya, yaitu tidak mengapa apabila seorang pembeli tidak menyukai barang perniagaan agar mengembalikan barang dan mengembalikan sesuatu bersamanya. Ahmad berkata, “ini masih dalam satu makna”. Menurut analis penulis pendapat yang terkuat diantara kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang membolehkan sistem transaksi jual beli *urbun* (uang muka).

2. Dasar Hukum Dan Metode Istinbath Yang Digunakan Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Menetapkan Fatwa Tentang Uang Muka Dalam Murabahah

Fatwa DSN-MUI tentang Uang Muka dalam Murabahah ditetapkan dengan nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 yang ditandatangani oleh K.H.M.A Sahal Mahfudh (ketua) dan Dr. H.M. Din Syamsuddin (sekertaris) pada tanggal 16 September 2000 M (17 Jumadil Akhir 1421 H). Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa (1). Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. (2). Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. (3). Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus member ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. (4). Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. (5). Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang Uang Muka dalam Murabahah terdapat sejumlah dalil yang dijadikan alasan: dua buah ayat AL-Qur’an, dua buah hadits, dan dua buah kaidah fiqh. Di samping itu dinyatakan pula bahwa uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*).

Sebelumnya disajikan mengenai pertimbangan “yuridis” berupa dalil-dalil yang dipergunakan oleh DSN-MUI baik berupa ayat Al-Qur’a, Hadits Nabi, Kaidah Fiqh, serta kesepakatan ulama mengenai kebolehan ulama mengenai uang muka dalam jual beli. Adapun dalul yang dipergunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang Uang Muka dalam Murabahah.

Dasar pertimbangan yuridis yang dilakukan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah masih menggunakan dalil-dalil yang bersifat general, baik berupa ayat-ayat Al-Qur’an atau hadits-hadits nabi. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwasannya konsep uang muka yang dalam kajian fikih disebut dengan *urbun* merupakan konsep yang hingga saat ini menuai konflik dikalangan para fuqaha. Ada fuqaha yang pro terhadap konsep *urbun* tersebut, dan adapula yang bersikap kontra. Adapun pihak yang memandang jual beli *urbun* merupakan akad yang batil dan terlarang adalah jumbuh fuqaha (mayoritas ahli fikih) yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi’i beserta pengikut mereka masing-masing. Adapun pihak yang membolehkan jual beli *urbun* adalah Imam Ahmad ibn Hanbal beserta pengikutnya.

Dalam menetapkan hukum mengenai uang muka dalam murabahah, DSN-MUI menggunakan dalil-dalil berupa ayat Al-Qur'an, hadits nabi dan kaidah fiqh. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh DSN-MUI dalam ber-*istinbat* masih menggunakan dalil-dalil umum. Hal ini tidak menutup kemungkinan DSN-MUI mempunyai pertimbangan lain tatkala menetapkan hukum mengenai uang muka dalam murabahah tersebut. \

Apabila dilihat, hadits-hadits yang digunakan landasan hukum oleh DSN-MUI dalam melakukan *istinbat* bukanlah hadits yang secara spesifik menyinggung masalah uang muka (*urbun*), akan tetapi hadits-hadits yang digunakan oleh DSN-MUI adalah hadits-hadits yang dimana segala bentuk syarat (dalam hal ini transaksi) tidak boleh sampai mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Serta hadits yang melarang dalam transaksi tidak boleh ada pihak yang merugikan atau yang dirugikan.

Begitu pula dengan kaidah fikih yang digunakan dalam menetapkan fatwa tersebut sama halnya dengan kedua hadits yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa. Yang mana kaidah itu menjelaskan bahwasannya segala bentuk transaksi boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Dan segala macam bentuk bahaya (dapat merugikan pihak yang melakukan transaksi) harus dihilangkan.

Nampaknya metode *istinbath* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan hukum uang muka dalam murabahah menggunakan konsep kemaslahatan. Dalam hal ini, barangkali bisa disebut dengan metode *masalah mursalah*, hal ini disebabkan tidak terdapatnya dalil khusus yang mengatur mengenai uang muka dalam murabahah tersebut disebabkan lemahnya kedua hadits yang berhubungan dengan uang muka tersebut.

3. Pengaruh Pendapat Para Fuqaha Klasik Terhadap Fatwa DSN Mengenai Uang Muka

Dalam memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, DSN-MUI dalam menetapkan fatwa nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah, nampaknya fatwa tersebut dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ahmad ibn Hanbal. Salah satu bukti bahwasannya DSN-MUI dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ahmad dan para pengikutnya adalah pendapat Imam Ahmad dan para pengikutnya membolehkan transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka, dengan menggunakan berbagai macam argumentasi yang salah satunya adalah hadits yang menyatakan diperbolehkannya transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka.

Dalam pembahasannya sebelumnya telah dipaparkan mengenai hadits tersebut yang menjadi pegangan Imam Ahmad dalam berargumentasi, serta kedudukan/tingkat derajat hadits tersebut yang mana derajat hadits tersebut adalah *dha'if* (lemah) dan menurut al-Syaukani di dalam kitab *Nail al-Auṭar* bahwa hadits tersebut tergolong hadits yang *mursal*.

Salah satu metode *istinbat* yang digunakan oleh Imam Ahmad adalah mengambil pendapat para sahabat dan menggunakan pula hadits *mursal*. Dalam hal ini Imam Ahmad ketika menetapkan hukum mengenai jual beli dengan menggunakan uang muka, dasar hukumnya bersumber dari pendapat para sahabat yang menyatakan bolehnya melakukan transaksi jual beli atau sewa menyewa dengan menggunakan uang muka, serta *fi'liyah* Umar ibn Khattab yang membolehkan jual beli dengan menggunakan uang muka.

Pemikiran/pendapat Imam Ahmad dan para pengikutnya mengenai bolehnya jual beli dengan menggunakan uang muka merupakan pendapat yang diambil oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa uang muka dalam murabahah, walaupun tidak secara eksplisit dalam fatwa tersebut diambil dari pemikiran Imam Ahmad.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ahmad dapat dilihat dalam fatwa nomor 4 tahun 2000 tentang Murabahah, yang salah satu landasan yuridis yang digunakan oleh DSN-MUI adalah hadits yang membolehkan jual beli dengan menggunakan uang muka, yang mana hadits tersebut adalah hadits yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam menetapkan hukum mengenai kebolehan jual beli dengan menggunakan uang muka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya fatwa DSN-MUI nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah tanpanya fatwa tersebut dipengaruhi oleh pemikiran/pendapat imam Ahmad beserta para pengikutnya yang membolehkan transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka.

3. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *urbun* (uang muka). Juhur ulama (mayoritas ahli fikih) mengatakan bahwa, *ba'i 'urbun* merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih sehingga hukum dari jual beli *urbun* adalah boleh.; *kedua*, Dasar hukum yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah menggunakan dalil-dalil, baik ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Kaidak-kaidah Fiqh. Namun semua landasan hukum yang digunakan oleh DSN-MUI masih menggunakan dalil-dalil yang umum, belum menyentuh secara spesifik mengenai jual beli *'urbun*. Metode *istinbath* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah menggunakan dua pendekatan, *pertama*, dengan menggunakan metode maslahat (kemaslahatan), *kedua*, dengan menggunakan metode *urf* sebagai dasar pertimbangan lain dalam menetapkan fatwa tersebut; *ketiga*, Fatwa DSN-MUI nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah tampaknya fatwa tersebut dipengaruhi oleh pemikiran/pendapat Imam Ahmad beserta para pengikutnya yang membolehkan transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, seluruh lembaga keuangan syariah hendaknya dalam melakukan praktik transaksi tidak keluar dari fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI, hal ini dikarenakan fatwa tersebut sebagai control agar dalam tataran praktik tidak terjadi adanya hal yang dilarang dalam melakukan transaksi; *kedua*, dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI serahusnya menggunakan dalil-dalil yang khusus mengani objek pembahasan, dan tidak menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum.

Daftar pustaka

- Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Raba al-Qazwani. (2008). *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Fikr.
- Imam al-Qurthubi. (2007). *Al-Jami al-Ahkam al-Quran*, Kairo: Dar al-Hadits.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Jaih Mubarak. (2004). *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy.

Kasmir. (1998). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Press.

Rachmadi Usman. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Wahbah al-Zuhaili (2010). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikir.